



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA**

**NOMOR 41 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SURABAYA TAHUN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,**

- Menimbang :** a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2026.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 100.3.2/4857/436.5/2025 tanggal 4 September 2025 Perihal : Propemperda Kota Surabaya Tahun 2026;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 100.3.2/5269/436.5/2025 tanggal 24 September 2025 Perihal : Propemperda Kota Surabaya Tahun 2026;
  3. Surat Walikota Surabaya Nomor : 100.3.2/21163/436.1.2/2025 tanggal 25 September 2025 Perihal : Penyampaian Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2026;
  4. Surat Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 005/BPP/IX/2025 tanggal 30 September 2025 Perihal : Usulan Judul Propemperda Tahun 2026;
  5. Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 34/KOMISIA/IX/2025 tanggal 22 September 2025 Perihal : Usulan Judul Rancangan Peraturan Daerah;
  6. Surat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 21/Kom.B/IX/2025 tanggal 22 September 2025 Perihal : Propemperda Kota Surabaya Tahun 2026;
  7. Surat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 335/KOM.C/IX/2025 tanggal 22 September 2025 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
  8. Surat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 45/Komisi.D/IX/2025 tanggal 25 September 2025 Perihal : Usulan Judul / Materi Rancangan Peraturan Daerah;
  9. Berita Acara Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya tanggal 07 Oktober 2025;
  10. Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 28 Oktober 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026.**

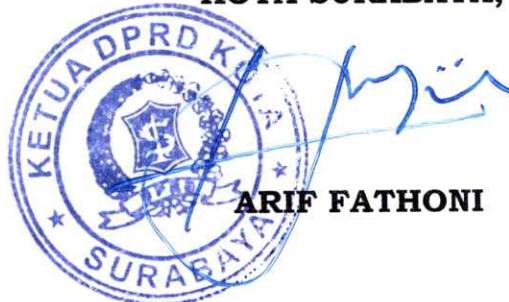
**KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2026;

**KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

**KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 NOVEMBER 2025**

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA,**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SURABAYA  
NOMOR : 41 TAHUN 2025  
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2025**

---

**A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD KOTA SURABAYA TAHUN 2026**

| NO | Tentang   | Materi Pokok | Status |      | Pelaksanaan | Disertai           |                                  | Perangkat Daerah/<br>Unit kerja/<br>Pemrakarsa  | Keterangan |
|----|---|--------------|--------|------|-------------|--------------------|----------------------------------|---|------------|
|    |   |              | Baru   | Ubah |             | Naskah<br>Akademik | Penjelasan<br>atau<br>Keterangan |   |            |
| 1  | 2   | 3            | 4      | 5    | 6           | 7                  | 8                                | 9   | 10         |
| 1. | Penanggulangan Bencana Daerah   |              | V      |      |             |                    |                                  | 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;<br>2. Dinas Lingkungan Hidup;   | Komisi A   |
| 2. | Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya |              |        | V    |             |                    |                                  | 1. Dinas Lingkungan Hidup;<br>2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan                             | Komisi C   |
| 3. | Ketahanan Keluarga  |              | V      |      |             |                    |                                  | 1. Dinas Sosial;<br>2. Dinas Kesehatan;   | Komisi D   |
| 4. | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro                |              |        | V    |             |                    |                                  | 1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;<br>2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah;<br>3. Dinas Penanaman Modal dan | BPP        |

|    |  |  |   |   |  |  |  |   |          |
|----|--|--|---|---|--|--|--|---|----------|
|    |  |  |   |   |  |  |  | Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan;<br>4. Dinas Perdagangan  |          |
| 5. | Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi  |  | V |   |  |  |  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya  | BPP      |
| 6. | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok  | Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok  |   | V |  |  |  | 1. Dinas Kesehatan;<br>2. Dinas Lingkungan Hidup;<br>3. Bagian Hukum dan Kerjasama  | BPP      |
| 7. | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |   | V |  |  |  | 1. Bagian Hukum dan Kerjasama<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;<br>3. Dinas Perhubungan<br>4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) | BPP      |
| 8. | Kesehatan Ibu dan Anak   |  | V |   |  |  |  | 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan   | Komisi D |

|     |  |  |   |  |  |  |  |  |     |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|-----|
|     |  |  |   |  |  |  |  | Keluarga<br>Berencana;<br>2. Dinas Kesehatan;<br>3. Dinas Sosial   |     |
| 9.  | Penyelenggaraan<br>Program Jaminan<br>Sosial<br>Ketenagakerjaan  |  | V |  |  |  |  | 1. Dinas<br>Perindustrian dan<br>Tenaga Kerja;<br>2. Bagian Hukum dan<br>Kerjasama;<br>3. BPJS<br>Ketenagakerjaan  | BPP |
| 10. | Perlindungan<br>Masyarakat dalam<br>Kepemilikan<br>Rumah dan/atau<br>Rumah Susun                         |  | V |  |  |  |  | 1. Bagian Hukum dan<br>Kerjasama;<br>2. Dinas Perumahan<br>Rakyat dan<br>Kawasan<br>Permukiman serta<br>Pertanahan;<br>3. Dinas Lingkungan<br>Hidup;   | BPP |
| 11. | Perlindungan<br>Perempuan  |  | V |  |  |  |  | 1. Bagian Hukum dan<br>Kerjasama;<br>2. Dinas Sosial;<br>3. Dinas Kesehatan  | BPP |
| 12. | Perubahan Perda<br>Nomor 16 Tahun<br>2014 tentang<br>Pelepasan Tanah<br>Aset Pemerintah<br>Kota Surabaya |  |   |  |  |  |  | 1. Dinas Ketahanan<br>Pangan dan<br>Pertanian (DKKP);<br>2. Dinas Sumber<br>Daya Air dan Bina<br>Marga;<br>3. Dinas Perumahan<br>Rakyat dan<br>Kawasan<br>Permukiman, serta<br>Pertanahan;<br>4. Bagian Hukum dan<br>Kerjasama | BPP |

|     |  |   |  |  |  |  |  |            |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|------------|--|
|     |  |   |  |  |  |  |  |            |  |
| 13. | Pariwisata   |   |  |  |  |  | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.                               | Komisi A   |  |
| 14. | Pemanfaatan lahan kosong milik Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Masyarakat |   |  |  |  |  | 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP);<br>2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga               | Komisi B - |  |
| 15. | Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas                               |   |  |  |  |  | 1. Dinas Kesehatan;<br>2. Dinas Pendidikan;<br>3. Dinas Sosial   | Komisi D   |  |
| 16. | Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat   |   |  |  |  |  | 1. Bakesbangpol;<br>2. Bagian Hukum dan Kerjasama  | BPP        |  |
| 17. | Energi Biru  |   |  |  |  |  | 1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga  | BPP        |  |
| 18. | Pengembangan Kampung Cerdas di Kota Surabaya   | Mencakup 6 Pilar utama :<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Smart governance;</li><li>2. Smart branding;</li><li>3. Smart economy;</li><li>4. Smart living;</li><li>5. Smart society;</li><li>6. Smart environment</li></ol> |  |  |  |  | 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;<br>2. Dinas Pendidikan;<br>3. Bagian Hukum dan Kerjasama; | Komisi A   |  |
| 19. | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun   | Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar   |  |  |  |  | 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;   | Komisi B   |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |   |          |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|     | 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya                           | Surya, Permodalan  |  |  |  |  |  | 2. Badan Pendapatan Daerah.<br>3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;<br>4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan<br>5. Bagian Hukum dan Kerjasama.   |          |
| 20. | Pengendalian dan Penanggulangan Banjir                               | Kebijakan yang mengatur pengendalian banjir di Kota Surabaya |  |  |  |  |  | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan<br>2. Dinas Sosial;<br>3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;<br>4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan<br>5. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;<br>6. Bagian Hukum dan Kerjasama. | Komisi C |
| 21. | Perubahan Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan | Memajukan pendidikan di Kota Surabaya                        |  |  |  |  |  | 1. Bagian Hukum dan Kerjasama;<br>2. Dinas Pendidikan   | Komisi D |
| 22. | Hunian Yang Layak  | Terkait Bangunan pada  |  |  |  |  |  | 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  | BPP      |

|     |   |  |   |  |  |  |   |   |  |
|-----|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
|     |   | penyediaan Rumah Susun                             |   |  |  |  |   | 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;<br>3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;<br>4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;<br>5. Bagian Hukum dan Kerjasama;<br>6. Dinas Sosial;<br>7. Dinas Lingkungan Hidup. |  |
| 23. | Pemajuan Kebudayaan, Kejuangan dan Kepahlawanan Kota Surabaya | Mengatur, menguatkan dan mengembangkan spirit      |   |  |  |  | 1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata;<br>2. Bagian Hukum dan Kerjasama  | BPP   |  |
| 24. | Pengelolaan Rumah Susun Komersial di Kota Surabaya            | Pengelolaan Rumah Susun Komersial di Kota Surabaya | V |  |  |  | 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;<br>2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;<br>3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;<br>4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; | Komisi C  |  |

|     |                                 |                                      |  |  |  |  |  |   |     |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-----|
|     |                                 |                                      |  |  |  |  |  | 5. Bagian Hukum dan Kerjasama;<br>6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan. |     |
| 25. | Pembentukan Produk Hukum Daerah | Produk Hukum Daerah di Kota Surabaya |  |  |  |  |  | Bagian Hukum dan Kerjasama  | BPP |

**B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026**

| NO | Tentang  | Materi Pokok  | STATUS |      | Pelaksanaan  | DISERTAI           |                                  | Perangkat Daerah/<br>Unit Kerja/<br>Pemrakarsa | KET |
|----|--|---|--------|------|--|--------------------|----------------------------------|--|-----|
|    |  |   | Baru   | Ubah |  | Naskah<br>Akademik | Penjelasan<br>Atau<br>Keterangan |  |     |
| 1  | 2  | 3   | 4      | 5    | 6  | 7                  | 8                                | 9  | 10  |
| 1. | Transportasi   | Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penataan kembali sistem transportasi                                  | ✓      |      | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan   | ✓                  |                                  | Dinas Perhubungan                              |     |
| 2. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Adanya upaya memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat yang permohonannya jumlahnya paling banyak yaitu akta kelahiran, serta mempercepat target capaian nasional |        | ✓    | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda |                    | ✓                                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil        |     |

|    |  |  |   |  |   |   |  |  |
|----|--|--|---|--|---|---|--|--|
|    |  |  |   |  | Penduduk Elektronik;<br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;<br>3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. |   |  |  |
| 3. | Rencana Pembangunan Industri Kota Surabaya | Penetapan Rencana Pembangunan Industri | ✓ |  | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  | ✓ |  | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya |
| 4. | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik     | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | ✓ |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;<br>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017  | ✓ |  | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga               |

|    |  |  |   |   |  |   |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|---|---|---|--|
|    |  |  |   |   | tentang<br>Penyelenggaraan<br>Sistem<br>Pengelolaan Air<br>Limbah Domestik<br>Peraturan Menteri<br>Dalam Negeri<br>Nomor 87 Tahun<br>2022 tentang<br>Percepatan<br>Layanan Sanitasi<br>Berkelanjutan di<br>Daerah Tahun<br>2022-2024 |   |   |   |  |
| 5. | <i>Grand Design</i><br>Pembangunan<br>Kependudukan<br>Tahun 2025-2045  | <i>Grand Design</i><br>Pembangunan<br>Kependudukan                                   | ✓ |   | 3. Peraturan<br>Presiden Nomor<br>153 Tahun 2014<br>tentang <i>Grand<br/>Design</i><br>Pembangunan<br>Kependudukan   | ✓ |   | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak<br>serta Pengendalian<br>Penduduk dan<br>Keluarga Berencana |  |
| 6. | Perubahan Atas<br>Peraturan Daerah<br>Kota Surabaya<br>Nomor 7 Tahun<br>2023 tentang<br>Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah | Penyesuaian tarif<br>dan penambahan<br>objek Pajak<br>Daerah dan<br>Retribusi Daerah |   | ✓ | 1. Undang-Undang<br>Nomor 1 Tahun<br>2022 tentang<br>Hubungan<br>Keuangan antara<br>Pemerintah Pusat<br>dan Pemerintah<br>Daerah;<br>2. Peraturan<br>Pemerintah<br>Nomor 35 Tahun<br>2023 tentang                                    | ✓ | ✓ | Badan Pendapatan<br>Daerah  |  |

|    |  |  |   |   |  |   |   |  |  |
|----|--|--|---|---|--|---|---|--|--|
|    |  |  |   |   | Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah   |   |   |  |  |
| 7. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota       | Penyesuaian luas Hutan Kota  |   | ✓ | Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota  | ✓ |   | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                           |  |
| 8. | Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                      | Penetapan Perencanaan Umum Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman   | ✓ |   | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  | ✓ |   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |  |
| 9. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Penyesuaian substansi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah |   | ✓ | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah |   | ✓ | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                     |  |

|     |                |   |   |  |  |   |  |   |  |
|-----|----------------|---|---|--|--|---|--|---|--|
|     |                |   |   |  | Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;<br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2026 |   |  |   |  |
| 10. | Inovasi Daerah | Penetapan Inovasi untuk pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | ✓ |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  | ✓ |  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |  |

|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Undang-Undang<br>Nomor 2 Tahun<br>2022 tentang<br>Cipta Kerja;<br>2. Peraturan<br>Pemerintah<br>Nomor 38 Tahun<br>2017 tentang<br>Inovasi Daerah. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

**C. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA**

| No | Tentang   | Materi Pokok | Status |      | Pelaksanaan | Disertai           |                                  | Perangkat Daerah/<br>Unit Kerja/<br>Pemrakarsa | Ket |
|----|---|--------------|--------|------|-------------|--------------------|----------------------------------|--|-----|
|    |   |              | Baru   | Ubah |             | Naskah<br>Akademik | Penjelasan<br>atau<br>Keterangan |  |     |
| 1  | 2   | 3            | 4      | 5    | 6           | 7                  | 8                                | 9  | 10  |
| 1. | Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung                   | -            | -      | -    | -           | -                  | -                                | -  | -   |
| 2. | Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. | -            | -      | -    | -           | -                  | -                                | -  | -   |

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 6 NOVEMBER 2025.

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

